

## FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI IMPLEMENTASI KEBIJAKAN DALAM MENANGANI RUMAH LIAR

## FACTORS THAT INFLUENCE THE IMPLEMENTATION OF POLICIES IN HANDLING WILD HOUSES

Dwi Septawinarti<sup>1</sup>, Linayati Lestari<sup>2</sup>, Erwin Ashari<sup>3</sup>

<sup>1</sup>(Prodi Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

<sup>2</sup>(Prodi Ilmu Pemerintahan, Fisipol, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

<sup>3</sup>(Prodi Bahasa Inggris, Fkip, Universitas Riau Kepulauan, Indonesia)

<sup>1</sup>dwisepta@gmail.com, <sup>2</sup>linayatilestari@yahoo.com, <sup>3</sup>erwinasharianja83@gmail.com

### Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah dalam rangka mengetahui bagaimana penegakan peraturan daerah, sebagaimana tertuang dalam pasal 148, 149 UU No 34 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, bahwa (1) Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) untuk pembantu kepala daerah dalam menegakan Peraturan Daerah dan penyelenggaraan ketertiban umum serta ketentraman masyarakat. Rumah Liar di Kota Batam sudah ada sejak dulu, perumahan liar menjadi permukiman atau tempat tinggal bagi masyarakat pendatang atau masyarakat yang kurang mampu untuk memiliki rumah di Batam. Kini rumah liar pun sudah merebak dimana-mana termasuk di Kecamatan Batu Aji. Hal ini menjadi persoalan utama bagi Pemerintah Kota Batam, dimana Pemerintah harus mengambil sikap tegas dalam masalah ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan penertiban permukiman liar di Kecamatan Batu Aji oleh Pemerintah Kota Batam serta mengetahui kesesuaian pelaksanaan penertiban permukiman liar di Kecamatan Batu Aji oleh Pemerintah Kota Batam dengan Peraturan Daerah Nomor 16 tahun 2007. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian di Kecamatan Batu Aji. Pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam menangani permukiman liar di Kecamatan Batu Aji sudah sesuai dengan aturan dan perundang-undangan yang berlaku, namun masih perlu membenahi terhadap kelemahan-kelemahan yang ada. Dalam hal penertiban permukiman liar yang masih banyak tersebar di Kecamatan Batu Aji, disarankan agar pemerintah dalam hal ini bertindak tegas sesuai dengan prosedur yang berlaku serta lebih mengedepankan sikap ramah, dan bersahabat terhadap pemilik rumah liar tersebut. Pihak instansi yang terkait, khususnya Pemerintah Kota Batam, dapat melakukan penyuluhan mengenai kebersihan lingkungan kepada masyarakat di area permukiman liar, agar nanti masyarakat lebih peka terhadap lingkungan yang kumuh tersebut dan secara langsung masyarakat dapat memelihara ataupun menjaga lingkungan permukimannya.

**Kata Kunci:** Implementasi kebijakan; Pemerintah; Rumah Liar

### Abstract

The purpose of this study is in order to find out how the enforcement of regional regulations, as stipulated in article 148, 149 of Law No. 34 of 2004 concerning Regional Government, that (1) the Civil Service Police Unit (Satpol PP) to assist regional heads in enforcing regional regulations and implementation of public order and public peace. The Wild House in Batam City has been around for a long time, illegal housing has become a settlement or residence for migrants or people who are less able to own a house in Batam. Now even wild homes have spread everywhere, including in Batu Aji District. This is a major problem for the Batam City Government, where the Government must take a firm stand on this issue. This study aims to determine the implementation of control of illegal settlements in the District of Batu Aji by the Batam City Government and determine the suitability of the implementation of control of illegal settlements in the District of Batu Aji by the Government of Batam City with Regional Regulation No. 16 of 2007. This research is a qualitative study. Research location in Batu Aji District. Data collection is done through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that in dealing with illegal settlements in Batu Aji District it is in accordance with the applicable rules and regulations, but it still needs to be addressed to the existing weaknesses. In terms of controlling illegal settlements that are still widely distributed in Batu Aji District, it is recommended that the government in this case act decisively in accordance with

*applicable procedures and prioritize a friendly, friendly attitude towards the owner of the illegal house. Parties of the relevant agencies, especially the Batam City Government, can do counseling about environmental cleanliness to the community in the area of illegal settlements, so that later the community is more sensitive to the slum environment and directly the community can maintain or protect the residential environment.*

**Keywords:** Policy Implementation; Government; Illegal Housing

## **PENDAHULUAN**

Kota Batam merupakan kota yang terletak pada lokasi yang regional yaitu sebagai salah satu gerbang di wilayah provinsi di Kepulauan Riau dan lingkup internasional telah menjadikan Kota Batam ini sebagai pusat pertumbuhan dan pengembangan ekonomi sekaligus pusat transit barang/ perdagangan, yang mana telah mendorong para investor asing menanamkan modalnya. Terbukanya lapangan kerja juga menjadikan dampak banyaknya imigran yang ingin untuk mencoba mengadu nasibnya ke Kota Batam. Visi Kota Batam “Terwujudnya Kota Batam Sebagai Bandar Dunia Madani yang Modern Pusat Pertumbuhan Nasional”. Pemerintah Kota Batam berupaya keras mewujudkannya ditengah banyaknya permasalahan-permasalahan yang dihadapi Kota Batam dalam perjalanan proses pengembangannya. Mulai dari permasalahan kelembagaan, dan permasalahan kerusakan mangrove, air serta tumbuh subur dan tidak terkendalinya rumah liar di Kota Batam.

Dimana kebijakan adalah serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu. Untuk melihat keberhasilan suatu kebijakan, amat sangat bergantung pada implementasi kebijakan itu sendiri. Dimana implementasi kebijakan merupakan tahapan dari proses kebijakan. Tahapan dari proses kebijakan segera setelah penetapan dari undang-undang. Secara luas implementasi mempunyai makna pelaksanaan undang-undang dimana berbagai aktor, organisasi, dan juga prosedur, dan dimana teknik bekerja bersama-sama untuk menjalankan kebijakan ataupun program.

Ruli merupakan istilah populer, singkatan yang dipakai untuk Rumah Liar di Kota Batam. Rumah liar adalah salah satu fenomena yang terjadi di Kota Batam disamping pembangunan Kota Batam itu sendiri. Jika berkendara dari satu tempat ketempat lainya di Kota Batam akan sangat mudah menemui rumah liar. Penduduk Kota Batam di dominasi oleh orang-orang pekerja dan banyaknya tempat kerja seperti

PT yang berada di Tanjung Uncang membuat mereka mencari tempat tinggal yang berdekatan dengan tempat kerja. Waktu untuk bekerja berputar secara ekonomis, baik pagi, siang, sore, maupun malam. Hal ini menuntut segala sesuatu harus efisien dan efektif dalam kehidupan sehari-hari.

Di Kota Batam juga sangat sulit untuk mencari pekerjaan serta semakin mahalnya penjualan perumahan di Kota Batam termasuk di Kecamatan Batu Aji, pada umumnya di daerah Batu Aji, membuat warga kebanyakan yang tinggal di rumah liar (ruli). Yang parah lagi, bertambahnya rumah liar di Kecamatan Batu Aji, hampir sama dengan jumlahnya dengan kios liar yang berada di kawasan buffer zone. Dari sinilah bermunculan di mana-mana rumah liar di Batu Aji. Berdasarkan data yang diperoleh bahwa jumlah perumahan liar di Kota Batam ini mencapai 30.868 unit. Keseluruhannya tersebar di 9 kecamatan, diantaranya Batam Kota, Batu Aji, Batu Ampar, Bengkong, Lubuk Baja, Nongsa, Sagulung, Sekupang, dan Sei Beduk. Dari kecamatan perkotaan yang ada di Batam, bahwa penghuni perumahan liar paling banyak berada di daerah Batu Aji.

Tabel 1: Jumlah Perumahan Liar di Kota Batam

No.	Penduduk Rumah Liar	Jumlah
1.	Yang sudah terdata dan mempunyai NIK dan K	21.841 unit
2.	Yang belum terdata dan tidak mempunyai NIK dan KK	9027 unit

Tabel 2: Data Rumah Liar Di Kecamatan Batu Aji Tahun 2017

No.	Kelurahan	Jumlah Pemukiman Liar
1.	Kelurahan Bukit Tempayan	906
2.	Kelurahan Buliang	1052
3.	Kelurahan Kibing	2913
4.	Kelurahan Tanjung Uncang	2050
	Jumlah	6921

Sumber: Data Kecamatan Batu Aji

Berdasarkan Tabel 2 memperlihatkan jumlah perumahan liar di Kecamatan Batu Aji tergolong tinggi. Dari jumlah penduduk 113.099 ribu, terdapat 6921 dengan jumlah perumahan liar atau bangunan liar terbanyak adalah kelurahan Kibing. Melihat banyaknya bangunan liar tersebut, potensi kerawanan yang mengancam keamanan dan ketertiban masyarakat sewaktu-waktu bisa terjadi. Kerawanan disini maksudnya

adalah kerawanan sosial yang diakibatkan oleh proses konflik yang ditimbulkan dari perbedaan pendapat suatu masyarakat atau kelompok golongan tertentu.

### **Implementasi Kebijakan**

Implementasi kebijakan yaitu kebijakan sebagai tindakan-tindakan dalam keputusan-keputusan sebelumnya. Tindakan-tindakan ini mencakup usaha-usaha untuk mengubah keputusan-keputusan menjadi tindakan-tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang ditetapkan oleh keputusan-keputusan kebijakan yang dilakukan oleh organisasi publik yang diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan yang telah ditetapkan. Adapun indikator dari implementasi kebijakan ialah: 1). Komunikasi, 2). Sumber Daya, 3). Disposisi, dan 4). Struktur Birokrasi.

### **Pemerintah**

Menurut R. Mac Iver, Pemerintah adalah suatu ilmu mengenai cara bagaimana orang-orang dapat diperintah ataupun dikendalikan. Pemerintah adalah organ yang berwenang memproses pelayanan publik dan berkewajiban memproses pelayanan sipil bagi setiap orang melalui hubungan pemerintah, sehingga setiap anggota masyarakat yang bersangkutan menerimanya pada saat diperlukan, sesuai dengan tuntutan (harapan) yang diperintah.

### **Rumah Liar dan Pemukiman Liar**

Undang-undang Republik Indonesia No. 4 Tahun 1992 Bab V Pasal 2 menyebutkan bahwa permukiman liar adalah bagian dari lingkungan hidup diluar kawasan lindung baik berupa kawasan perdesaan maupun perkotaan yang berfungsi sebagai tempat tinggal atau hunian atau lingkungan hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perkehidupan dan penghidupan.

Peneliti memilih teori menurut Masrun, dimana permukiman liar adalah permukiman yang tidak layak huni antara lain karena berada pada lahan yang tidak sesuai dengan peruntukkan atau tata ruang, kepadatan bangunan yang sangat tinggi dalam luasan yang sangat terbatas, rawan penyakit sosial dan penyakit lingkungan, kualitas umum bangunan rendah, membahayakan keberlangsungan kehidupan dan penghuninya.

## **METODOLOGI**

Jenis Penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk mengetahui fenomena tentang apa yang dialami oleh subyek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan-tindakan, dan lain-lain. Adapun lokasi penelitian dilakukan dilokasi Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Sumber data berasal dari data primer dan data sekunder. Populasi terdiri dari semua permukiman di Kecamatan Batu Aji, Kota Batam. Sampel ditentukan dengan *purposive sampling* yaitu salah satu teknik pengambilan berdasarkan “penilaian” (*judgment*) peneliti mengenai siapa saja yang pantas (memenuhi persyaratan) untuk dijadikan sampel.

## **PEMBAHASAN**

### **Komunikasi**

Komunikasi sangat menentukan keberhasilan suatu pencapaian tujuan dari implementasi kebijakan pemerintah Kota Batam dalam menangani rumah liar di Kecamatan Batu Aji berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2007, salah satu aspek yang perlu dan harus diperhatikan adalah berupa adanya komunikasi yang berjalan dengan baik diantara pihak-pihak yang terkait, apa yang menjadi tujuan dan sasaran kebijakan ditransmisikan (dikomunikasikan) kepada kelompok sasaran kebijakan (*target group*) dalam hal ini pemerintah Kota Batam dengan beberapa petugas lainnya harus merelisasikan indikator komunikasi yang tepat, akurat dan konsisten, sehingga akan mengurangi distorsi implementasi dalam upaya pencapaian tujuan tersebut. Komunikasi dalam hal ini menyangkut tentang cara atau upaya dalam proses penyampaian informasi, selain pentingnya informasi sebagai pendukung dalam komunikasi, juga diperlukan proses transmisi atau penyampaian informasi, kejelasan dan konsistensi atas informasi.

### **Sumber Daya**

Informasi tentang proses implementasi mungkin telah disampaikan dengan teliti, jelas dan konsistensi tetapi jika pelaksana kekurangan sumber daya yang diperlukan untuk menyelesaikan implementasi kebijakan maka pengimplementasian tidak akan berjalan sesuai dengan apa yang diinginkan. Sumber daya merupakan salah satu faktor penting dalam proses implementasi atau pelaksanaan suatu program atau kebijakan, dimana tanpa adanya dukungan dari sumber daya yang memadai, baik itu

berupa jumlah maupun kemampuan atau keahlian para pelaksana program atau kebijakan pelaksanaan program tidak akan mencapai tujuannya. Ketersediaan sumber daya dalam melaksanakan sebuah program atau kebijakan merupakan salah satu faktor yang harus selalu diperhatikan, jika kebijakan tersebut terlaksana sebagaimana yang telah direncanakan. Dalam hal ini sumber daya yang dimaksud adalah sumber daya manusia (SDM) dari pelaksana kebijakan baik itu secara kualitas maupun kuantitasnya seperti staf yang cukup, memadai dan berkompeten dibidangnya, selain itu dalam aspek sumber daya juga perlu didukung oleh bagaimana ketersediaan informasi guna pengambilan keputusan, kewenangan serta fasilitas yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program atau implementasi kebijakan pemerintah Kota Batam dalam menangani rumah liar di Kecamatan Batu Aji.

### **Disposisi (Sikap Pelaksana)**

Sikap pelaksana dalam penelitian ini dikategorikan dalam bentuk dua indikator, yaitu ketegasan petugas dan transparansi petugas. Disposisi merupakan kemauan, keinginan dan kecenderungan para pelaku untuk melaksanakan kebijakan tadi secara sungguh-sungguh sehingga apa yang menjadi tujuan kebijakan dapat diwujudkan. Dalam implementasi kebijakan penanganan rumah liar, kemauan, dan kesungguhan para pelaksana dalam melakukan kebijakan sudah baik.

### **Struktur Birokrasi**

Membahas badan pelaksana suatu kebijakan, tidak dapat dilepaskan dari struktur birokrasi. Struktur birokrasi adalah karakteristik, norma-norma dan pola-pola hubungan yang terjadi berulang-ulang dalam badan-badan eksekutif yang mempunyai hubungan baik potensial maupun nyata dengan apa yang mereka miliki dalam menjalankan kebijakan. Pada pembahasan mengenai hasil dalam faktor struktur birokrasi yang terdapat pada implementasi kebijakan. Struktur birokrasi mencakup dimensi yaitu penyebaran tanggung jawab suatu kebijakan kepada beberapa badan yang berbeda sehingga memerlukan koordinasi. Selain itu, struktur birokrasi mencakup dimensi standar prosedur operasional yang akan memudahkan dan menyeragamkan tindakan dari pelaksana kebijakan dalam melaksanakan apa yang menjadi tugasnya.

Dari beberapa hasil wawancara yang dilakukan, dapat disimpulkan bahwa dalam Struktur organisasi pada Kecamatan Batu Aji menggambarkan dengan jelas

pemisahan kegiatan pekerjaan antara yang satu dengan yang lainnya berbeda. Dalam struktur organisasi ini pola koordinasi yang terjalin menempatkan Camat sebagai pejabat yang tertinggi di Kecamatan Batu Aji. Dan juga dalam hal penertiban rumah liar di Kecamatan Batu Aji Tim Terpadu sudah tahu dengan benar apa saja tugas-tugas mereka, karena sebelum melakukan pengusuran telah dilakukan rapat terlebih dahulu.

## **KESIMPULAN**

Didalam hal penertiban yang dilakukan Pemerintah Kota Batam dan pihak-pihak yang terkait dalam hal komunikasi sudah sangat baik dan jelas. Memberikan petunjuk atau arahan kepada masyarakat rumah liar yang ada di Kecamatan Batu Aji, sehingga masyarakat dapat dengan mudahnya mengerti apa yang telah disampaikan dalam sosialisasi tersebut. Dalam hal ini peneliti lebih memilih indikator dari komunikasi menurut C. Edward III. Berdasarkan uraian pada hasil kesimpulan diatas, peneliti menyimpulkan hasil penelitian sebagai berikut: (1). *Komunikasi*, komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah Kota Batam dan pihak-pihak yang terkait dalam menangani rumah liar sudah cukup baik, namun pemerintah harus dapat mengambil sikap yang tepat dan bijaksana, ramah, bersahabat dan dapat menciptakan suasana batin dan nuansa kesejukan bagi masyarakat, namun tetap tegas dalam bertindak demi tegaknya peraturan yang berlaku, khususnya dalam menangani atau menertibkan permukiman liar yang ada di Kecamatan Batu Aji; (2). *Sumber daya*, kegagalan yang sering terjadi dalam implementasi kebijakan ini, salah satunya disebabkan oleh pihak-pihak pelaksana dalam menangani rumah liar tidak cukup memadai, mencukupi, ataupun tidak berkompeten dalam bidangnya. Penambahan jumlah orang pun tidak cukup menyelesaikan persoalan rumah liar ini, tetapi diperlukan kemampuan atau keahlian yang diperlukan dalam implementasi kebijakan; (3). *Disposisi*, sikap penerimaan atau penolakan dari pelaksana kebijakan sangat mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan dalam menangani rumah liar. Sikap pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan apabila personel yang ada tidak melaksanakan kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat yang lebih atas. Karena itu pemilihan personel pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus lagi pada kepentingan warga masyarakat; dan (4). *Struktur birokrasi*, yang menggambarkan posisi dan pembagian tugas sudah tersusun dengan baik dan juga dapat dijadikan sebagai alat ukur yang berguna bagi suatu instansi untuk memberikan bimbingan dalam pelaksanaan penertiban ini.

## REFERENSI

- Aprostowo. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Perspektif Rancangan Penelitian*. Yogyakarta:Ar-Ruzz Media.
- B.Mathew dan Michael Huberman.1992. *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta:UIP.
- Cevilla Convello G, dkk. 1993. *Pengantar Metode Penelitian*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Hamidi. 2004. *Metode Penelitian Kualitatif, Aplikasi Praktis Pembuatan Proposal dan Laporan Penelitian*, Malang : UMM Press.
- Indriyani, I, Lestari, L, & Rasal, A. (2019). Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pemberian Kompensasi Pada Pegawai Kantor Kecamatan Nongsa. *Jurnal Dimensi*. Vol. 8. No. 1., Maret 2019. Hal. 127-141. ISSN: 2085-9996.
- Lexy J Maleong. 2000. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Remaja Rosdakarya.
- Mardalis. 1999. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Moh Panbudu. 2005.*Metode Penelitian Geografi*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Puji Melita Sugiana.2012. *Implementasi Kebijakan Penanggulangan Kemiskinan Melalui Program Pemberdayaan Ekonomi KUBE Di Jakarta Selatan*. Program Studi Administrasi Kebijakan Publik, Universitas Indonesia.
- Ripley, Rendal B. and Grace A. Franklin. 2002. *Policy Implementation and Bureaucracy*,Second edition, the Dorsey Press. Chicago-Illionis.
- Sadyohutomo. 2009. *Manajemen Kota dan Wilayah*. Jakarta : Bumi Aksara.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiyono.2009. *Metode Penelitian Kuantitaif Kualitatif dan R&d*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono.2012.*Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Ed Revisi*. Jakarta : Rineka Cipta.
- Verill M. Law & W. David Kelton. 1999. *Simulation Modelling & Analysis*. Second Edition: Mc Graw-Hills.
- Buku Panduan Kantor Kecamatan Batu Aji Tahun 2017.
- Data monografi Kecamatan Batu Aji tahun 2015.
- Peraturan Derah Kota Batam Nomor: 2 Tahun 2005, tentang pemekaran, perubahan,

perbentukan Kecamatan Batu dan Kelurahan di daerah Kota Batam.

Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 16 tahun 2007 tentang Ketertiban Umum  
Pemerintah Kota Batam:Kecamatan Batu Aji Dalam Angka, 202, Badan Perencanaan  
Pembangunan Daerah.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 1999 Tentang Pembentukan  
Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Singingi, Kabupaten  
Natuna, Kabupaten Siak, Karimun dan Juga Kota Batam.

Nurma Ari Widyaningrum. 2012. *Implementasi Kebijakan Pajak Pertambahan Nilai  
(PPN) Atas Subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) Tabung 3 Kilogram.*  
Universitas Indonesia, Depok.

[www.Bapedda Kota Batam, 2011.com](http://www.Bapedda Kota Batam, 2011.com).

<http://Citra-Wayan/2013/03/Keberadaan-Permukiman-Liar.html>.

<http://permukimankumuh-diAmerikaSerikat>.

<http://aflahchintya.wordpress.com>.

[www.Posmetro.co/read/2017/10/06/60b0-Rumah liar Kota Batam](http://www.Posmetro.co/read/2017/10/06/60b0-Rumah-liar-Kota-Batam).

[www.academia.edu/9761534/permukimanliar](http://www.academia.edu/9761534/permukimanliar).

[batam.go.id/profil-geografis.html](http://batam.go.id/profil-geografis.html).